

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah utama di Negara Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Misalnya dalam pergantian pemimpin, kemiskinan senantiasa menjadi objek dalam periode kepemimpinan tersebut. mereka selalu membawa isu kemiskinan sebagai salah satu misi utama mereka.

Menurut badan pusat statistik (2017) kemiskinan mempunyai aturan yang beragam, nilai kemiskinan mengacu pada kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang minimal 2100 kalori perkapita perhari, ditambah dengan keperluan non-pangan yang menjadi kebutuhan mendasar dari seseorang antara lain: kebutuhan primer dan sekunder individu yang mendasarinya.

Badan pusat statistik mendefinisikan (2017) kemiskinan didasarkan dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Seseorang yang dikatakan miskin jika pengeluarannya lebih rendah dari garis kemiskinan. Menurut Bappenas (2004) kemiskinan adalah kondisi dimana individu atau kelompok baik laki-laki atau perempuan, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan dalam mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah, air yang bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik merupakan kebutuhan mendasar manusia.

Menurut Sharp (2000) kemiskinan bersumber dari rendahnya kualitas angkatan kerja, sulitnya akses kepemilikan modal, pengetahuan tentang teknologi masih sangat rendah, tidak efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada, dan tingginya pertumbuhan penduduk.

Menurut Departemen Koperasi (2008) pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang menjadi sejarah untuk di kenang selanjutnya di susul pada tahun 2008 dimana saat itu tingkat inflasi cenderung tinggi, pengangguran dan kemiskinan. pada tahun sebelumnya 2006 jumlah penduduk miskin di perkirakan sekitar 39,05 juta orang, naik sekitar 3,95 juta orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35,5 juta. Tetapi pada saat itu hanya sektor UMKM yang mampu menunjukkan eksistensinya dibandingkan sektor usaha lain. UMKM sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi apalagi untuk memberantas kemiskinan yaitu dengan menyerap tenaga kerja yang ada di daerahnya masing-masing. Semakin banyak sektor Usaha Kecil Menengah di suatu daerah, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, oleh karena itu angka kemiskinan di daerah tersebut dapat berkurang.

Kemiskinan bisa menjadi salah satu masalah utama bagi setiap daerah contohnya di Provinsi Gorontalo. Bahkan Gorontalo termasuk urutan ke empat Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak (BPS 2016). Adapun jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo dapat di lihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Tahun 2016 - 2020**

Wilayah Se-Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Boalemo	32,29	34,35	32,83	31,31	31,63
Kab. Gorontalo	78,36	76,93	74,69	68,31	66,72
Kab. Pohuwato	31,66	32,56	30,39	29,13	28,92
Kab. Bone Bolango	27,8	27,91	27,61	25,91	25,72
Kab. Gorut	20,65	21,67	21,09	19,46	19,56
Kota Gorontalo	12,43	11,95	11,91	11,91	12,46
Jumlah	203,19	205,37	198,52	186,03	185,01

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2021

Pada Tabel 1.1 di atas Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo pada setiap tahunnya memiliki jumlah yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa penduduk miskin dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan kemudian terus menurun dari tahun 2018-2020. Faktor yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat adalah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Dengan demikian pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai alat pengukur kasar taraf kemakmuran yang dicapai penduduk suatu negara.

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek yang timbul dari pengangguran yaitu rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak terhadap tingkat kemakmuran. Semakin rendah tingkat kemakmuran masyarakat akibat

pengangguran maka semakin meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan yang akan menimbulkan masalah lainnya.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta pemertaan distribusi pendapatan yaitu dengan meningkatkan skala usaha sehingga kemampuannya dengan menciptakan nilai tambah senantiasa meningkat. Dengan demikian, skala usaha bertambah besar dan kontribusinya terhadap PDB juga meningkat. Pemerintah mengambil strategi pengembangan sektor UMKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kurangnya kreatifitas, modal, teknologi, pemasaran, promosi, dll juga menjadi hambatan untuk kemajuan suatu usaha.

Pada era otonomi daerah saat ini, diperlukam berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Karena mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekomoni tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerinth pusat tetapi juga pemerintah daerah.

Berikut Tabel 1.2 tentang Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja UMKM di Provinsi Gorontalo Tahun 2020:

Tabel 1.2
Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja UMKM di Provinsi Gorontalo
Tahun 2020

Kab/Kota	Jumlah Unit UMKM	Tenaga Kerja UMKM
Kab. Boalemo	899	2.402
Kab. Gorontalo	3.928	11.185
Kab. Pohuwato	3.042	3.042
Kab. Bone Bolango	2.810	6.981
Kab. Gorut	697	1.534
Kota Gorontalo	3.549	7.700
Jumlah	14.925	32.844

Sumber: Dinas Kumperindag, 2021

Pada uraian Tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah UMKM terbanyak terdapat di Kab.Gorontalo yaitu dengan jumlah 3.928 unit UMKM dengan serapan tenaga kerja UMKM sebanyak 11.185 jiwa. Sedangkan jumlah UMKM terkecil terdapat di Kab.Gorontalo Utara yaitu dengan jumlah 697 unit UMKM dengan serapan tenaga kerja sebanyak 1.534 jiwa.

Keberadaan UMKM tentunya memberikan andil yang cukup signifikan untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Gorontalo, dalam hal ini jumlah UMKM yang besar di Provinsi Gorontalo tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran, usaha yang mereka bangun menyerap tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Semakin banyak jumlah unit usaha

maka, semakin banyak pula tenaga kerja yang diperlukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah unit UMKM mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut sangat membantu pihak pemerintah di Provinsi Gorontalo dalam mengatasi masalah pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan, untuk itu diharapkan perkembangan bisnis dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang stabil.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja UMKM Terhadap Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pengaruh jumlah UMKM terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo?

1.2.2 Bagaimana pengaruh tenaga kerja UMKM terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh jumlah UMKM terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

1.3.2 Untuk mengetahui tenaga kerja UMKM terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat yang lebih bijaksana serta adil dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

1.4.2 Secara Teoritis

Bagi penulis penelitian ini dijadikan sebagai wahana pembelajaran untuk menambah pengetahuan sekaligus penelitian ini digunakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi dan studi pembangunan.